



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.806, 2015

KEMENKUMHAM. Target Kinerja.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TARGET KINERJA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang hukum dan hak asasi manusia serta untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah atau sedang dilaksanakan, perlu menetapkan target kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk tahun 2015;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1698);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Target Kinerja adalah rencana atau strategi yang diterapkan untuk melakukan percepatan suatu kegiatan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tim Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Target Kinerja yang selanjutnya disebut Tim Pemantauan dan Evaluasi adalah tim yang dibentuk untuk memantau dan melakukan evaluasi pelaksanaan Target Kinerja.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
4. Unit Eselon I Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Unit eselon I adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

Pasal 2

Target Kinerja bertujuan untuk:

- a. mempercepat pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. meningkatkan peran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka peningkatan kualitas pembentukan dan pelayanan hukum serta pemenuhan/pemajuan hak asasi manusia kepada masyarakat;
- c. meningkatkan integritas aparatur hukum dan hak asasi manusia;
- d. meningkatkan koordinasi antarlembaga penegak hukum; dan
- e. mendorong terwujudnya penguatan perekonomian domestik bagi peningkatan dan perluasan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah wajib melaksanakan Target Kinerja.
- (2) Target Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

Pelaksanaan Target Kinerja dikoordinasikan oleh Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah di lingkungan kerja masing-masing.

Pasal 5

- (1) Pimpinan Unit Eselon I dan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyampaikan laporan pelaksanaan Target Kinerja kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala, pada:**
 - a. bulan ke enam (B06), paling lambat tanggal 5 Juli Tahun 2015;**
 - b. bulan ke sembilan (B09), paling lambat tanggal 5 Oktober Tahun 2015; dan**
 - c. bulan ke dua belas (B12), paling lambat tanggal 5 Januari 2016.**

Pasal 6

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Target Kinerja sesuai target capaian dapat diberikan penghargaan.**
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:**
 - a. telah mencapai seluruh target yang ditentukan sebelum batas waktu yang ditetapkan dalam Target Kinerja; dan**
 - b. tingkat penyerapan anggaran Target Kinerja dan kegiatan yang optimal.**

Pasal 7

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berupa penambahan alokasi anggaran untuk tahun anggaran 2016.**
- (2) Penambahan alokasi anggaran untuk Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
- (3) Penambahan alokasi anggaran untuk Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
- (4) Penambahan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada saat pagu alokasi anggaran.**

Pasal 8

- (1) Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang telah melaksanakan Target Kinerja tetapi tidak memenuhi target capaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dapat dikenakan sanksi.**
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan alokasi anggaran untuk tahun 2016.**

Pasal 9

Pengenaan sanksi terhadap Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) tidak boleh menghambat pencapaian target untuk tahun berikutnya dan menurunkan kualitas pelayanan publik.

Pasal 10

Menteri membentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Target Kinerja

Pasal 11

Tim Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 bertugas:

- a. memantau pelaksanaan Target kinerja;**
- b. mengevaluasi laporan pelaksanaan Target Kinerja;**
- c. memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Target Kinerja; dan**
- d. menyampaikan usul dan pertimbangan kepada Menteri mengenai Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi.**

Pasal 12

Menteri menetapkan Unit Eselon I dan Kantor Wilayah yang akan diberikan penghargaan atau dikenakan sanksi dengan Keputusan Menteri.

Pasal 13

Pelaksanaan Target Kinerja dilakukan tanpa menimbulkan pembebanan biaya baru pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Unit Eselon I dan Kantor Wilayah tahun anggaran 2015.

Pasal 14

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA TAHUN 2015

TARGET KINERJA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2015

A. Target Kinerja Unit Eselon I

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
7	Penguatan pola pikir dan budaya kerja dalam kerangka revolusi mental	Adanya Komitmen Pimpinan yang kuat dan konsisten dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Dilandatungannya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh Menteri Hukum dan HAM, 11 pimpinan unit eselon I, 33 Kepala Kantor Wilayah, dan 773 Kepala LPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	E06 : Dilandatungannya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh Menteri Hukum dan HAM dan 11 pimpinan unit eselon I dan eselon II Pusat dan 33 Kepala Kantor Wilayah E09 : Dilandatungannya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh 387 Kepala LPT Dilandatungannya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh 386 Kepala	Tina Retornasi Birokrasi Kerangka (Koordinator : Sekretaris Jenderal)

NO	TARGET KINERJA KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Agren Perubhar sebagai <i>role model</i> dalam reformasi birokrasi dalam rangka revolusi mental</p> <p>Terbentuknya agen perubahan melalui <i>coaching and mentoring</i> dengan penerapan <i>reward punishment</i></p> <p>BO6 : Terbentuknya Surat Peretapar Agen Perubhar dan sosialisasi BO9 : Pembuatan Modul untuk <i>coaching and mentoring</i> serta implementasinya</p>	<p>Tersosialisasikannya dan terinternalisasikannya nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM dalam semangat "Kami PASTI" dengan yel-yel "Salam Pembangunan.....Kami PASTI" kepada 44.178 pegawai Kementerian</p> <p>BO6 : Sosialisasi "Kami PASTI" melalui media web resmi Kementerian 2. Terjalinnya SE terkait memasukkan nilai semangat "Kami PASTI" kedalam materi arahan pimpinan baik di tingkat pusat maupun Kantor Wilayah.</p> <p>DO9 : Surrey tingkat pemahaman pegawai terhadap nilai nilai "Kami PASTI" beserta yel-yelnya.</p> <p>DI2 : Rekomendasi tindak lanjut atas hasil survey</p>	<p>UPT</p> <p>BO6 : Sosialisasi "Kami PASTI" melalui media web resmi Kementerian 2. Terjalinnya SE terkait memasukkan nilai semangat "Kami PASTI" kedalam materi arahan pimpinan baik di tingkat pusat maupun Kantor Wilayah.</p> <p>DO9 : Surrey tingkat pemahaman pegawai terhadap nilai nilai "Kami PASTI" beserta yel-yelnya.</p> <p>DI2 : Rekomendasi tindak lanjut atas hasil survey</p> <p>1.11 Unit Eselon I 2. Pustjabang (BO9)</p>	<p>Tim Reformasi Birokrasi Kementanham</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
2	Pembentukan Sistem Sistem Informasi dan Database Peraturan Perundang-Undangan	<p>Adanya perijakan perilaku pegawai terhadap kinerja, etika, dan kedekpliman.</p> <p>Meningkatnya 20% tingkat disiplin pegawai dilihat dari indikator absensi dan pembayaran tunjangan kinerja</p> <p>Adanya <i>Quick Win</i> Kementerian Hukum dan HAM berdampak dan dirasakan langsung masyarakat.</p> <p>Tersosialisasikan <i>quick win</i> 2015 kepada 44.178 pegawai Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>Masyarakat dapat mengakses Sistem Informasi Pembentukan dan Database Peraturan Perundang-undangan akurat dan update</p>	<p>Monitoring dan evaluasi</p> <p>B12 :</p> <p>B06 : 1. SE Penertiban absensi pegawai 2. SE Pencanangan gerakan "Ayo Kerja" B09 : Implementasi "Ayo Kerja" B12 : Laporan Monitoring dan Evaluasi</p> <p>B06 : SK Menkumham ug <i>Quick Win</i> Kementerian Hukum dan HAM B09 : Sosialisasi dan implementasi B12 : Laporan Monitoring dan Evaluasi</p>	<p>11 Unit Eselon I</p> <p>Tim Reformasi Birokrasi Kementerian</p>	<p>Dijum. Peraturan Perundang-Undangan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITEKRIA KEBERHASILAN	UKURAN KEMERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		<p>(terkini).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya Sistem Informasi Pembentukan dan Database Peraturan Perundang-undangan yang dapat diakses oleh masyarakat secara cepat, akurat dan update (terkini) 2. Pembaruan dan Penambahan Konten dan Database Peraturan Terundang undangan yang mengaksas Sistem Informasi dan Database Peraturan Terundang undangan 3. Data Jumlah Pengunjung <p>B12: Data Jumlah Pengunjung</p>			

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
3	<p>Percepatan penyusunan Rancangan Undang-Undang yang mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.</p>	<p>Terlaksananya penyusunan Rancangan Undang-undang yang mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi secara insentif</p>	<p>Tersusunnya Rancangan Undang-Undang yang mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.</p>	<p>BO6 : 1. Ditetapkannya Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang penunjukan panitia antar kementerian penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ekstradisi dan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Asset Tindak Pidana. 2. Terlaksananya rapat-rapat Panitia Penyusunan KUU tentang Ekstradisi 3. Terlaksananya rapat-rapat Panitia Penyusunan KUU tentang Perampasan Asset Tindak Pidana</p>	<p>Ditjen. Peraturan Perundang-Undangan</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				<p>PAK untuk dilakukan pengharmonisasian, penbulatan, dan penarikan konsepsi.</p> <p>3. Terselenggaranya Pengharmonisasian RUU tentang Ekstradisi</p> <p>4. Terlaksananya rapat antar kementerian dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-undang tentang perampasan aset tindak pidana.</p> <p>B12 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terevisitasinya pemharmonisasian RUU tentang Ekstradisi. 2. Penyempurnaan usul Prolegnas prioritas 2016 untuk Rancangan Undang-undang Ekstradisi 3. Tersusunnya RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERLIASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
4	Penyempurnaan Buku Panduan Penyusunan	Terlaksananya penyempurnaan Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah	Adanya kemudahan dan penyempurnaan mekanisme penyusunan peraturan daerah.	D06 : 1.Tersusunnya panduan penyusunan Penyempurnaan Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah 2.Tersusunnya rencana kerja penyusunan Penyempurnaan Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah 3. Tersusunnya Penyempurnaan Bab I Pendahuluan dan Bab II Kedudukan, Fungsi, dan Materi Muatan Peraturan Daerah Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah B09 : 1. Tersusunnya Draft Penyempurnaan Bab III Aspek Aspek Tembentukan Peraturan Daerah, Bab IV Landasan dan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah, dan Bab V Aksesibilitas Publik	Dijem. Peraturan Perundang Undangan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah</p> <p>2. Tersusunnya Draft Penyempurnaan Bab VI Pengregistrasian Prinsip Hak Asasi Manusia, Kesetaraan (gender, dan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bab VII Penyusunan Perda APBD, Perda Pajak Daerah, Perda Retribusi Daerah, Perda Rencana Tata Ruang Daerah, dan</p> <p>Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Bab VIII Jenis Norma, Terumusan Norma, dan Bahasa Serta Terancam untuk Penegakan Hukum Peraturan Perundang-undangan Buku penyusunan peraturan daerah.</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
5	Penataan dan penguatan organisasi	<p>Merupakan kajian terhadap penguatan unit kerja organisasi, Tataletsa, Kepegawaian dan Diklat pada Unit Eselon I</p>	<p>Adanya dokumen rekomendasi hasil kajian terhadap penguatan unit kerja organisasi, Tataletsa, Kepegawaian dan Diklat pada Unit Eselon I</p>	<p>D.12 : 1. Tersusunnya draft penyempurnaan Bab IX Teknik Penyusunan Peraturan Daerah Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah 2. Tersusunnya Buku Panduan Penyusunan Peraturan Daerah yang disempurnakan</p> <p>B06 : Rapat koordinasi sebanyak minimal 3 kali</p> <p>B09 : Tersusunnya kajian penguatan unit kerja organisasi, Tataletsa, Kepegawaian dan Diklat pada Unit Eselon I</p> <p>B12 : Dokumen rekomendasi hasil kajian penguatan unit kerja organisasi, Tataletsa, Kepegawaian dan Diklat pada Unit Eselon I.</p> <p>B06 : Rapat Koordinasi sebanyak minimal 4 kali</p>	<p>Pusjati Surabaya –Sekretariat Jendral</p> <p>Biro Perencanaan- Sekretariat Jendral & 10 Unit Eselon II lainnya</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	<p>peningkatan fungsi eselon I</p>	<p>dalam rangka penguatan fungsi eselon I</p>	<p>Pusat</p>	<p>B09 : Tersusunnya kajian ORTA Pusat B12 : Terjalinnya Permenkumham tentang peraturan Organisasi Tataleksana Pusat</p>	<p>Biro Perencanaan- Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon I Lainnya</p>
	<p>Melakukan evaluasi ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi melalui penyusunan uraian tugas dan fungsi re-organisasi pada Balitbangham</p>	<p>Terbitnya Permenkumham tentang uraian tugas dan fungsi re-organisasi pada Balitbangham</p>	<p>B06 : Rapat koordinasi sebanyak minimal 4 kali B09 : Tersusunnya kajian tentang uraian tugas dan fungsi re-organisasi pada Balitbangham B12 : Terjalinnya Permenkumham tentang uraian tugas dan fungsi re-organisasi pada Balitbangham.</p>	<p>B06 : Rapat koordinasi sebanyak minimal 4 kali B09 : Kwalifikasi dan kajian tentang peningkatan kelas jabatan melalui penataan organisasi</p>	<p>Biro Perencanaan- Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon I Lainnya</p>
	<p>Peningkatan kelas jabatan melalui penataan organisasi Eselon I ke bawah.</p>	<p>Terbitnya Permenkumham tentang peningkatan kelas jabatan melalui penataan organisasi Eselon I ke bawah.</p>	<p>B06 : Kajian dan kajian tentang peningkatan kelas jabatan melalui penataan organisasi</p>	<p>B06 : Kajian dan kajian tentang peningkatan kelas jabatan melalui penataan organisasi</p>	<p>Biro Perencanaan- Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon I Lainnya</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB	
6	Penataan dan penguatan pelaksanaan lataksema	Melakukan Pemetaan terhadap proses bisnis dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Tersusunnya dokumen rencana proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM	Eselon I ke bawah. B12 : Terjinya Permenkumham tentang peningkatan kelas jabatan melalui penataan organisasi Eselon II, III, IV dan V B06 : Rapat koordinasi sebanyak 6 kali B09 : Draft dokumen pemetaan proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM B12 : Terjinya Kepmenkumham ttg dokumen pemetaan proses bisnis Kementerian Hukum dan HAM	100% masyarakat memperoleh informasi publik sesuai aturan dan kebijakan ketertarikan informasi yg diatur dalam Undang-undang	Biro Perencanaan- Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon I Lainnya
		Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan ketertarikan informasi publik secara berkala.	B06 : Inventarisasi daftar informasi yang dapat dipublikasikan B09 : Publikasi informasi terkait RENCANA, RIKAZI, LAPORAN BMN, LAKIP. B12 : Publikasi informasi terkait mutasi dan rotasi	Biro Humas Dan Bagian Humas 10 Unit Eselon I		

NO	TARGET KINERJA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Menyusun SOP terhadap pengubahan proses bisnis pada kegiatan utama yang belum dibuat SOP.</p>	<p>Dokumen SOP yang telah disempurnakan.</p>	<p>ditinjau: Kemenkumham, dan Pengadaan Sarja.</p> <p>BKMs : 1. Rapat koordinasi minimal 3 kali 2. Inwentarisasi SOP yang tidak up to date. BO9 : Penyempurnaan SOP sebanyak 50 SOP B12 : Penyempurnaan SOP sebanyak 50 SOP</p>	<p>Biro Perencanaan- Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon I Lainnya</p>
	<p>Menyusun Grand Desigr Sistem IT Kemenkumham Tahun 2015 – 2019</p>	<p>Terdapatnya arah pengembangan Teknologi Informasi di satuan kerja Kemerkumham</p>	<p>MO6 : Pembentukan SK Tim Grand Desigr Sistem IT Kemenkumham tahun 2015 – 2019 BO9 : Rapat pembalasan Grand Desigr Sistem It Kemenkumham 2015 – 2019 B12 : Perintahnya Peraturan Menteri Hubdan dan HAM tentang Grand Desigr Sistem IT Kemenkumham tahun 2015 – 2019</p>	<p>Biro Perencanaan- Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon I Lainnya</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
7	Penilaian dan penguatan Sistem Manajemen SDM	Terimplementasi kinerja penilaian pegawai (SKP) secara online berbasis website pppk.kemerkumham.go.id yang bisa update setiap saat datanya.	50% dari seluruh pegawai memenuhi SKP secara online	B06 : Sosialisasi penilaian kinerja pegawai (SKP) secara online berbasis website pppk.kemerkumham.go.id. B09 : 25% pegawai Kementanham mengisi SKP B12 : 1. 25% pegawai Kementanham mengisi SKP 2. Laporan Morer SKP	Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal
		Integrasi dan Otomasi Administrasi dan Pelayanan Kepegawaian dalam SIMPEG	Terlaksananya administrasi dan pelayanan kepegawaian secara otomatis dan terintegrasi dalam SIMPEG	B06 : ADM dan pelayanan KCB dan cuti terintegrasi dengan SIMPEG ADM jabatan struktural terintegrasi dengan SIMPEG B09 : ADM peregakar hukumar disiplin terintegrasi dengan SIMPEG B12 : ADM pemborhentian PNS terintegrasi dengan SIMPEG.	

NO	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	<p>KRITERIA KEBERHASILAN</p> <p>UKURAN KEBERHASILAN</p> <p>TARGET CAPAIAN</p> <p>Pola mutasi berbasis kinerja disesuaikan dengan Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor : 5 Tahun 2014.</p> <p>Adanya dokumen Grand Design mutasi berbasis kinerja di lingkungan Kementerian untuk tahun 2015-2019</p> <p>Rapat koordinasi minimal 6 kali</p> <p>Draft pola mutasi berbasis kinerja sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014 ttg ASN</p> <p>Terbitnya Peraturan Menteri trg Grand Desigr mutasi berbasis kinerja di lingkungan Kementerian untuk tahun 2015-2019.</p>	<p>Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal</p>
	<p>Assesment dalam rangka ketepatan penempatan pegawai sesuai kompetensi dalam rangka promosi jabatan struktural dan fungsional tertentu</p> <p>Seluruh pegawai yang akan menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu mendapatkan kesempatan untuk di assesment.</p> <p>B06 : Inventarisasi data assesment usulan perempatan pegawai</p> <p>B09 : Melakukan assesment tahap I (50% dari usulan promosi)</p> <p>B12 : Melaksanakan assesment tahap II (50% dari usulan promosi)</p>	<p>Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal</p>
	<p>Percepatan peningkatan kompetensi</p> <p>Terselenggaranya assesment menggunakan metode <i>Computer Assisted</i></p>	<p>B06 : 1. SK Tim Telaahana Assesment dan</p> <p>BPSDM</p>

NO	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	<p>KRITERIA KEBERHASILAN</p> <p>melalui <i>assessment</i> menggunakan metode CAT, dilat menggunakan metode <i>e learning</i></p> <p>UKURAN KEBERHASILAN</p> <p>Test (CAT)</p> <p>Percepatar peningkatan kompetensi melalui Assesmen menggunakan metode CAT dan dilat menggunakan metode <i>e-learning</i></p> <p>Terselenggaranya <i>assessment</i> pegawai menggunakan metode <i>Computer Assisted Test (CAT)</i></p> <p>TARGET CAPAIAN</p> <p>SK</p> <p>Teserta Assesmen dengan menggunakan metode CAT pada 13 Kantor Wilayah (14 SK)</p> <p>2. Aralisa data hasil <i>assessment</i></p> <p>3. Penjabatan hasil <i>assessment</i> untuk 11 Kantor Wilayah</p> <p>BOY :</p> <p>Input data <i>Assessment</i> Pegawai di (BHRIS 2.700 orang (: dokumen)</p> <p>BI2 :</p> <p>Laporan pelaksanaan <i>assessment</i> melalui <i>Computer Assisted Test</i> bagi pegawai (1 dokumen)</p> <p>BOB :</p> <p>1. SK Tim Pelaksana <i>Assessment</i> dan SK Peserta <i>Assessment</i> menggunakan metode CAT pada :3 Kantor Wilayah (14 SK)</p> <p>2. Aralisa data hasil <i>Assessment</i></p> <p>3. Penjabatan hasil</p>	<p>DPSPDM</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITEKRIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Tersedianya penyediaan kompetensi pegawai melalui Diklat Metode e learning</p>	<p>1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pegajar dilkat metode e learning untuk 17 angkatan (51 SK) 2. Pelaksanaan dilkat metode e-learning 17 angkatan [17 dokumen] BOY: 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pegajar dilkat metode e- learning untuk 15 angkatan (45 SK) 2. Pelaksanaan dilkat metode e-learning 15 angkatan [15 dokumen]</p>		<p>assessment untuk 13 Kantor Wilayah BOY: Input data Assessment Pegawai di CBHRIS 2.700 orang (1 dokumen) B: 2: Laporan pelaksanaan assessment melalui (Computer Assisted Test bagi pegawai [1 dokumen]) BO6:</p>	

NO	TARGET KINERJA KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Tingkatkan Kompetensi Aparatur Penegak Hukum dan Instruksi Terkait di Bidang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu</p>	<p>Terselenggaranya diklat SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instruksi Terkait dan SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum</p>	<p>B.2: 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat metode e learning untuk 14 angkatan (42 SK) 2. Pelaksanaan diklat metode e learning 14 angkatan [14 dokumen] 3. Kualitas Pelaksanaan diklat metode e-learning [1 Dokumen]</p>	
		<p>B.6: 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat SPPA Bagi Angkatan untuk 3 angkatan [9 SK] 2. Pelaksanaan diklat SPPA Bagi Angkatan untuk 3 angkatan [120 orang, 3 dokumen]</p> <p>B.9: 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat SPPA Bagi Angkatan untuk 3 angkatan [9 SK] 2. Pelaksanaan diklat SPPA</p>		

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Peningkatan Kompetensi Aparatur Pengagk Hukum di Bidang Hak Asasi</p>	<p>Terselenggaranya diklat HAM bagi Aparatur Pengagk Hukum</p>	<p>106: SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat HAM bagi Aparatur Pengagk Hukum untuk 5 orang (15 SK)</p>	<p>Untuk 3 angkatan (120 orang, 3 dokumen) 3. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat SPPPT Bagi Aparatur untuk 1 angkatan (3 SK) 4. Pelaksanaan diklat SPPPT Bagi Aparatur untuk 1 angkatan (40 orang, 1 dokumen). H.2: 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat SPPA Bagi Aparatur untuk 1 angkatan (3 SK) 2. Pelaksanaan diklat SPPA Bagi Aparatur untuk 1 angkatan (40 orang, 1 dokumen) 3. Evaluasi Pelaksanaan diklat SPPA dan SPPPT (2 Dokumen)</p>	

NO	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	<p>KRITERIA KEBERHASILAN</p> <p>Marusia</p> <p>Tingkatkan Kompetensi Terancang Peraturan Perundang-undangan</p> <p>Terselenggaranya diklat Tenguatan Terancang Teraturan Perundang-undangan, Calon Pejabat Fungsional Terancang Perundang-undangan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda</p> <p>B09: Pelaksanaan Diklat HAM bagi Appalium untuk 4 angkatan (120 orang, 4 dokumen)</p> <p>B12: 1. Pelaksanaan Diklat HAM bagi Appalium untuk 1 angkatan (30 orang, 1 dokumen) 2. Kwalifikasi pelaksanaan Diklat HAM bagi Appalium (1 dokumen)</p> <p>B06: 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang Perundang-undangan untuk 2 angkatan (6 SK) 2. Pelaksanaan diklat Calon Pejabat Fungsional Perancang Perundang-undangan untuk 2 angkatan (60 orang, 2 dokumen) 3. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat Perangatar</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				<p>Perencanaan untuk 1 angkatan (3 SK)</p> <p>4. Pelaksanaan dilat Penguatan Perencanaan untuk 1 angkatan (30 orang, 1 dokumen B09:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat Calon Pejabat Fungsional Perencanaan Perundang-undangan untuk 1 angkatan (3 SK) 2. Pelaksanaan diklat Calon Pejabat Fungsional Perencanaan Perundang-undangan untuk 1 angkatan (30 orang, 1 dokumen) 3. SK Tim Pelaksana, Peserta dan Tenaga Pengajar diklat Terencana Perundang undangan: Ahli Muda untuk 2 angkatan (6 SK) 4. Pelaksanaan dilat Perencanaan Terundang undangan Ahli Muda untuk 2 angkatan (60 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		<p>“bank kader” ditingkatkan Kementerian Hukum dan Hukum dan HAM RI</p>	<p>Terbentuknya kader-kader profesional ditingkatkan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>B06 : Rapat koordinasi minimal 3 kali B09 : Penyusunan daftar inventarisasi kader profesional kementerianham B12 : Penerapan kader profesional kementerian hukum dan HAM sebanyak 200 orang</p>	<p>Biro Kepegawaian- Sekretariat Jenderal Dan Bagian Kepegawaian Unit Eselon I</p>
8	<p>Penguatan akuntabilitas kinerja</p>	<p>Pengembangan evaluasi kinerja pegawai secara online</p>	<p>50% kinerja pegawai telah dilakukan evaluasi secara online</p>	<p>B06 : Rapat koordinasi B09 : 25 % kinerja pegawai telah dilakukan evaluasi secara online</p>	<p>Biro Kepegawaian- Sekretariat Jenderal</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
9	Perkuat pengawas dan pengendalian internal	<p>e-Lakip Kementerian secara online</p> <p>Terlaksananya penerapan pengaduan di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Tersedianya aplikasi e-Lakip Kementerian online</p> <p>Laporan pengaduan yang ditindaklanjuti</p>	<p>B12 : 50% kinerja pegawai dilakukan evaluasi secara online</p> <p>B06 : Rapat koordinasi</p> <p>B09 : Tersedianya konten aplikasi e-LAKIP</p> <p>B12 : Uji coba aplikasi e-Lakip</p> <p>D06 : Tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat Semester I</p> <p>B09 : Tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat triwulan III</p> <p>B12 : Laporan evaluasi penerapan pengaduan masyarakat</p> <p>D06 : penberikan tim mengerai masalah benuran kepertingar di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM</p> <p>B09 :</p>	<p>Biro Perencanaan-Sekretariat Jenderal & 10 Unit Eselon I Lainnya</p> <p>Inspektorat Jenderal</p> <p>Inspektoral Jenderal</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		<p>2. Tersosialisasikannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur masalah ketentuan kepentingan ditingkatkan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>2. Tersosialisasikannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur masalah ketentuan kepentingan ditingkatkan Kementerian Hukum dan HAM</p>	<p>Rapat koordinasi interjenral Aturan berturun kepertingan B12 : : Terjunnya aturan berupa Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur masalah berturun kepertingan dilir pklaur gan Kementerian Hukum dan HAM 2. Sosialisasi melalui website</p>	Inspektorat Jenderal
	<p>Tertentuknya Zona integrasi menuju Satuan Kerja WBK/WBBM</p>	<p>Tetapkan Jumlah Satuan kerja yang diusulkan dengan Tredikat WBK/WBBM</p>	<p>BO6 : Pelaksanaan pembinaan Satker menuju WBK/WBBM BO9 : Laporan pembinaan, penliatir dan usulan Satker WUBK dan WUBM B12 : Lyaluasi kejiatar penliatir Satker WUBK dan WUBM</p>	<p>BO6 : perencanaan pembangunan sistem aplikasi pelaporar grafitikasi online di Tingsunggar Kemenukram</p>	Inspektorat Jenderal

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Peringkat kompetensi dan penguasaan APP dalam mengelola program dan kegiatan Kementerian Hukum dan HAM;</p>	<p>Peringkat kompetensi dan penguasaan APP dalam mengelola program dan kegiatan Kementerian Hukum dan HAM;</p>	<p>Meningkatnya kompetensi APP dalam mengelola program dan kegiatan Kementerian Hukum dan HAM;</p>	<p>BO9 : Tersedianya sistem aplikasi pelaporan grafikasi online B12 : Sosialisasi, evaluasi dan tindak lanjut. BO6 : Koordinasi dengan penyelenggara kegiatan yaitu baik internal dan eksternal BO9 : Terlaksananya pelatihan dan pendidikan aparaturnya dengan minimal 25% dari total jumlah auditor B12 : Laporan evaluasi pelaksanaan peningkatan pendidikan dan pelatihan APP BO6 : Pembentukan tim dan rapat tim BO9 : 1. penentuan standar pelaksanaan mitigasi risiko dalam kegiatan utama dalam setiap unit eselon I 2. Sosialisasi dan koordinasi</p>	<p>Inspektoral Jenderal</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
10	Peningkatan mutu dan standar layanan publik	Melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala	Seluruh pelayanan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan evaluasi dan review	<p>standar pelaksanaan mitigasi risiko dalam kegiatan utama terhadap 11 unit eselon I</p> <p>B12 : Laporan pelaksanaan mitigasi risiko terhadap kegiatan utama dalam unit eselon I</p> <p>B06 : Pelaksanaan evaluasi SPIP pada Sektor di lingkungan Kementerianham</p> <p>B09 : Laporan evaluasi kegiatan implementasi SPPI di lingkungan Kementerianham B12: Laporan kompilasi dan penelaah pelaksanaan SPIP</p> <p>B06 : Rapat koordinasi antar unit layanan</p> <p>B09 : Evaluasi dan review pelayanan publik B12 : Rekomendasi dan tindak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen. Imigrasi • Ditjen AHU • Ditjen ITKI • Ditjen Pemasaraktan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			lanjut		
	Penyusunan Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik	Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM ttg Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik	BO6 : Rapat koordinasi minimal 3 kali BO9 : Adanya kajian ttg Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik B12 : Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM ttg Pedoman Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen. Imigrasi • Ditjen AHU • Ditjen HKI • Ditjen Pemasarakatan • Pusjianbang 	
	Hasil survey kepuasan masyarakat di upload pada website Kementerian Hukum dan HAM	Dipublikasikannya hasil survey kepuasan masyarakat pada web resmi Kementerian	BO6 : Rapat koordinasi minimal 3 kali BO9 : Upload hasil survey: kepuasan masyarakat B12 : Monev dan tindak lanjut	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen. Imigrasi • Ditjen AHU • Ditjen LIKI • Ditjen Pemasarakatan 	
	Penyusunan Instrumen Monitoring dan Evaluasi Standar	Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Instrumen Monitoring dan Evaluasi Standar	BO6 : Rapat koordinasi penyusunan moner SRM minimal 4 kali	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen. Imigrasi • Ditjen AHU • Ditjen LIKI • Ditjen Pemasarakatan 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
11	Penguatan layanan administrasi hukum umum	<p>Pelayanan Minimal</p> <p>Terwujudnya sistem database Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan secara elektronik</p>	<p>Masyarakat memperoleh layanan sistem database Badan Hukum Yayasan dan Perkumpulan secara elektronik</p> <p>Disalkannya Permenkumham tentang Permasalahan Warga Negara Tanpa Dokumen (Undocumented) di Indonesia</p>	<p>B09 : Draft instrumen moUv SFM B12 : Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Instrumen Monitoring dan Evaluasi Standar Pelayanan Minimal</p> <p>B06 : 1. Pembentukan Tim Koordinasi Kegiatan 2. Pencapaian dan Persiapan Migrasi Data</p> <p>B09 : Pelaksanaan Migrasi 50% B12 : Pelaksanaan migrasi 100 %</p> <p>B06 : Pembentukan Tim Pengumpulan Data dan Bahan Materi B09 : Pengusunan Permenkumham tentang Permasalahan Warga Negara Tanpa Dokumen (Undocumented) di Indonesia B12 : ... Terbitnya Permenkumham</p>	<p>Diijun. AHU</p> <p>Diijun. AHU</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pusjانبang ▪ Sekretaris Jenderal

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
12	Penguatan layanan keimigrasian	Tersedianya Fasilitas Autogate untuk pemeriksaan keimigrasian warga negara Indonesia yang masuk dari keluar melalui TPI Bandara Juanda dan Bandar Udara Soeta Terminal 3 Ultimate.	Operasionalisasi Autogate untuk pemeriksaan keimigrasian warga negara Indonesia yang masuk dari keluar melalui TPI Bandara Juanda sebanyak 4 (empat) unit di kedatangan dan 3 (tiga) unit di keberangkatan, TPI Bandara Udara Soeta Terminal 3 Ultimate sebanyak : 5 (lima belas) di kedatangan dan : 0 (sepuluh) unit di kedatangan.	B06 : 1. Pembentukan Tim Pelaksana Penerimaan 2. Pengadaan dan pemasangan perangkel autogate. 3. Ujicoba implementasi Autogate di TPI Bandara Juanda dan TPI Bandara Udara Soeta yang keseluruhannya sejumlah 31 Autogate. B09 : Implementasi (lanunhirg) pemeriksaan keimigrasian warga negara Indonesia yang masuk dari keluar melalui TPI Bandara Juanda dan Bandar Udara Soeta Terminal 3 Ultimate dengan fasilitas Autogate B12 : Monitoring dan evaluasi.	Ditjen. Imigrasi

NO	TARGET KINERJA	KRITEKRIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	Implementasi Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor	Terlaksananya operasional Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 53 Kantor Imigrasi	B06 : 1. Penentuan Tim Pelaksana Persiapan; 2. Pengadaan Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor dengan Urut Layaran Pengadaan Ditjenim untuk 53 Kantor Imigrasi; 3. Pemasang dan uji coba di 7 Kantor Imigrasi. 4. Pemasang dan uji coba Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 5 Kantor Imigrasi (tahap II) sehingga totalnya menjadi 12 Kantor Imigrasi.	B09 : Pemasangan dan uji coba Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 20 Kantor Imigrasi (tahap III) sehingga totalnya menjadi 32 Kantor Imigrasi. B12 : 1. Pemasang dan uji coba Sistem Informasi Antrian Permohonan Paspor di 21 Kantor Imigrasi (tahap IV) sehingga totalnya menjadi	Dijeri Imigrasi

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	Implementasi sistem pelaporan orang asing online	Terlaksananya aplikasi sistem pelaporan orang asing online di Kantor Imigrasi.	<p>53 Kantor Imigrasi;</p> <p>2. Pemertajapan dan evaluasi</p> <p>B06 :</p> <p>1. Pembentukan Tim Rancang Bangun Aplikasi Sistem Pelaporan Orang Asing Online;</p> <p>2. Pengkoordinasian dengan Dit. Sistik terkait dengan modul dan kesistemen.</p> <p>B09 :</p> <p>1. Pengadaan perangkat lunak untuk sistem pelaporan orang asing online</p> <p>2. Pemasangan dan uji coba di 61 (enam puluh satu) Kantor Imigrasi.</p> <p>B12 :</p> <p>Pemasangan dan uji coba di 60 (enam puluh) Kantor Imigrasi (tahap II) sehingga total menjadi : 21 (sepatas dua puluh satu) Kantor Imigrasi</p>	Ditjen Imigrasi	PENANGGUNG JAWAB
	Implementasi penyempaian permohonan: izin perpanjangar: izin	Terlaksananya aplikasi penyempaian sistem permohonan perpanjangar: izin tinggal kunjungan	<p>B06 :</p> <p>1. Pembentukan Tim Rancang Bangun Aplikasi Sistem penyempaian:</p>	Ditjen Imigrasi	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
13	Penguasaan layanan baik pelayanan intelektual	<p>tinggal kunjungan secara online.</p> <p>secara online di Kantor Imigrasi.</p>	<p>1. Penyelesaian 10 kasus yang telah ditangani pada tahun sebelumnya (T21 atau SP3)</p> <p>2. 100 % tindak lanjut dari pengaduan masyarakat atas pelanggaran HKI.</p>	<p>permohonan: perpanjangan izin tinggal kunjungan secara online; dengan modul dan pembangunan keistimaran.</p> <p>B09 : Pemesangan dan uji coba implementasi sistem permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan secara online di 10 (sepuluh) Kantor Imigrasi (tahap I) B12 : Pemasangan dan uji coba implementasi sistem permohonan perpanjangan izin tinggal kunjungan secara online di 111 (seratus sebelas) Kantor Imigrasi (tahap II) sehingga total menjadi 121 Kantor Imigrasi.</p> <p>B06 : 1. Menyelesaikan 10 kasus yang telah diterima ditahun sebelumnya 2. Menerima pengaduan sebanyak 5 kasus 3. Melaksanakan kan</p>	Ditjen IMI

NO	TARGET KINERJA KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	<p>Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan HKI oleh masyarakat</p>	<p>Meningkatnya jumlah Anggota Masyarakat Indonesia yang memahami dan memanfaatkan HKI</p>	<p>penindakan: sebanyak 10 kasus BO9 : 1. Menerima pengaduan sebanyak 20 kasus 2. Melaksanakan penindakan: sebanyak 20 kasus B12 : 1. Menerima pengaduan sebanyak 25 kasus 2. Melaksanakan penindakan: sebanyak 25 kasus</p>	<p>Ditjen HKI</p>
	<p>Meningkatnya jumlah Anggota Masyarakat Indonesia yang memahami dan memanfaatkan HKI</p>	<p>Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang memperoleh diseminasi dari sosialisasi HKI sebanyak 4 juta orang</p>	<p>BO6 : Penetapan kawasan aerodroma HKI (KBHKI) sebanyak 7 kawasan BO9 : Meningkatnya jumlah anggota masyarakat yang memperoleh diseminasi dari sosialisasi HKI sebanyak 4 juta orang B12 : Meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan kekayaan intelektual pada 33 provinsi</p>	<p>Ditjen HKI</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITEKRIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	Peningkatan pelayanan dari penyelesaian pendaftaran dari/atau pemberian Kekayaan Intelektual]	Peningkatan jumlah penyelesaian permohonan Hak Cipta dibandingkan tahun sebelumnya	<p>B06 : Penyelesaian permohonan pendaftaran Ciptaan sebanyak 500 dokumen dalam jangka waktu 6 bulan.</p> <p>B09 : Penyelesaian permohonan pendaftaran Ciptaan sebanyak 1000 dokumen dalam jangka waktu 5 bulan.</p> <p>B12 : Penyelesaian permohonan pendaftaran Ciptaan sebanyak 1.500 dokumen dalam jangka waktu 4 bulan.</p> <p>B06 : Penyelesaian permohonan pendaftaran Desain Industri sebanyak 2.000 dokumen dalam jangka waktu 11 bulan.</p> <p>B09 : Penyelesaian permohonan pendaftaran Desain Industri sebanyak 3.000 dokumen dalam jangka waktu 10 bulan.</p> <p>B12 : Penyelesaian permohonan pendaftaran Desain Industri</p>	<p>Dijeri III</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			Penringkatan Jumlah penyelesaian permohonan Merek diwujudkan tahun sebelumnya B06 : Penyelesaian permohonan atau perpanjang Merek 25.000 permohonan B09 : Penyelesaian permohonan atau perpanjang Merek dari 37.500 permohonan H12 : Penyelesaian permohonan atau perpanjang Merek dari 50.000 permohonan	sebanyak 4.000 dokumen dalam jangka waktu 9 bulan.	
14 Optimalisasi pengurusan Sistem Databas Permasyarakatan (SDP)	Terlengkapya data dari informasi sistem databas permasyarakatan yang akurat	1. Telah dilaksanakannya Penyusunan Grand Desain IT Permasyarakatan	B06 : Penyelesaian permohonan Paten diwujudkan tahun sebelumnya B06 : Penringkatan Jumlah penyelesaian permohonan Paten diwujudkan tahun sebelumnya B09 : Paten diwujudkan tahun sebelumnya B12 : 2916 Dok	B06 : Penyusunan draft Grand Desain IT Permasyarakatan B09 : Pembahasan draft Grand Desain IT Permasyarakatan B12 : Finalisasi draft Grand Desain IT Permasyarakatan	Ditjen Permasyarakatan

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		<p>2.50 % (lima puluh persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasyrakatan melakukan Pengimputan data dan memvalidasi aplikasi SDP secara tertani</p>	<p>BO6 : 15 % (lima belas persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasyrakatan melakukan Pengimputan dan memvalidasi data SDP secara tertani</p> <p>BO9 : 30 % (tiga puluh persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasyrakatan melakukan Pengimputan dan memvalidasi data SDP secara tertani</p> <p>B12 : 50 % (lima puluh persen) Unit Pelaksana Teknis Pemasyrakatan melakukan Pengimputan dan memvalidasi data SDP secara tertani</p>	<p>BO6 : 1. Finalisasi standar penilaian berkelakuan baik Warga Binaan Pemasyrakatan berbasis teknologi informasi 2. Uji manual standar berkelakuan baik</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
				<p>3. Evaluasi uji mawjud</p> <p>BO9:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Aplikasi/fitur standar penjamin berkelelahan baik Warga Binaan Pemasyarakatan 2. Uji Fungsi aplikasi <p>H12:</p> <p>Uji Petik dan Sosialisasi serendah penilaian berkelelahan baik Warga Binaan Pemasyarakatan</p> <p>nermasia teknologi informasi pada : Lapas pilot</p>	
				<p>b. Remisi online</p> <p>BO6:</p> <p>Pengembangan fitur remisi online</p> <p>BO9:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uji fungsi Aplikasi/fitur remisi online 2. Penyusunan regulasi remisi online <p>H12:</p> <p>Uji Petik dan Sosialisasi remisi online</p>	
				<p>c. Pergawasan program pembinaan dan pembinaan</p> <p>BO6:</p> <p>Draft dan fitur Pergawasan program pembinaan dan pembinaan</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		<p>d. Perawatan dan pelayanan kesehatan di Lapas, Rutan dan Bapas</p>	<p>B09: Aplikasi/fitur Pengawasan program pembinaan dan pembinaan B12: Uji Petik dan Sosialisasi Pengawasan program pembinaan dan pembinaan B06: Peningkatan fitur Perawatan dan pelayanan kesehatan di Lapas, Rutan dan Bapas B09: Pengembangan fitur Perawatan dan pelayanan kesehatan di Lapas, Rutan dan Bapas B12: Uji fungsi Aplikasi/fitur Perawatan dan pelayanan kesehatan di Lapas, Rutan dan Bapas B06: Tersedianya data basan basan sesuai format laporan basan basan yang memuat jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola,</p>		

NO TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	TUKUPAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
15 Penguasaan layanan pemasyarakatan	Transparansi pelayanan: CB, PB, dan CMB sesuai aturan yang berlaku dan online sistem	Masyarakat memperoleh layanan CB, PB, CMB secara online, cepat dan bebas pungli	<p>situasi yang dikelola (termasuk jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, kondisinya, dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang sitaan)</p> <p>kondisinya, dan tindakan yang diambil</p> <p>B09: Terlaksananya upload data dasar baran pada aplikasi sms gateway Diterpas</p> <p>B12: Terpublikasi dalam website Diterpas</p> <p>B06: Jumlah WBP yang mendapatkan layanan CB, PB, CMB secara online, cepat dan bebas pungli pada bulan Januari-Mei 2015</p> <p>B09: Jumlah WBP yang mendapatkan layanan CB, PB, CMB secara online, cepat dan bebas pungli pada bulan Juni-Agustus 2015</p> <p>B12: Jumlah WBP yang mendapatkan layanan CB, PB, CMB secara online, cepat dan bebas pungli pada bulan September-Desember 2015</p>	Dijin Pemasyarakatan

NO	TARGET KINERJA	KRITEKRIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
16	Penguatan peran pemerintah terhadap HAM	<p>1. Terlaksananya penguatan HAM bagi aparaturnya Pemda, Guru, tenaga kesehatan dan Satpol pp</p> <p>2. Meningkatkan pemahaman LAM aparaturnya Pemda, Guru, tenaga kesehatan dan Satpol PP yang mengikuti penguatan HAM.</p>	<p>Pelajar, guru, tenaga kesehatan dan Satpol PP yang mengikuti penguatan HAM dan menggunakan HAM di 15 Provinsi.</p>	<p>B06 : 4 Provinsi B09 : 10 Provinsi B12 : 15 Provinsi</p>	Dijin HAM

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
17	Penguatan Peran Pemerintah Terhadap HAM	<p>Tersusun profil pembangunan HAM (Bidang Kesehatan, Ketersediaan, Pendidikan dan Masyarakat Adat).</p>	<p>1. Tersusunnya profil pembangunan HAM 2. Terpublikasikannya profil pembangunan HAM.</p> <p>B06 : Tersusunnya konsep indikator pembangunan HAM. B09 : Tersedianya data implementasi Bidang Kesehatan, Ketersediaan, Pendidikan dan Masyarakat Adat. B12 : Tersusunnya profil pembangunan HAM Bidang Kesehatan, Ketersediaan, Pendidikan dan Masyarakat Adat. 2. Tercetak dan dipublikasikannya profil pembangunan HAM Bidang Kesehatan, Ketersediaan, Pendidikan dan Masyarakat Adat</p>	<p>MO6 : Tersusunnya proposal penelitian; 2. Tersusunnya Desain Penelitian; 3. Tersusunnya instrumen</p>	<p>Penelitian Peran Negara Terhadap Targeturug Jawab Bisnis Perusahaan Tambang Dalam</p>
				<p>Dibjen HAM</p>	<p>Ditbangham</p>

NO	TARGET KINERJA	PENANGGUNG JAWAB
	<p>KRITERIA KEBERHASILAN</p> <p>UKURAN KEBERHASILAN</p> <p>TARGET CAPAIAN</p> <p>Penelitian: HAM</p> <p>perusahaan; tambahan; potensi peluang; HAM akibat dampak kegiatan bisnis; perusahaan tambahan;</p> <p>2. Tersedianya rekomendasi kebijakan berupa <i>policy memo</i> dan <i>policy brief</i> yang akan disampaikan kepada pemerintah kepentirgan.</p> <p>penelitian;</p> <p>4. Tersedianya data hasil disiasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>5. Terlaksananya presertasi desain penelitian;</p> <p>6. Tersedianya hasil penelitian lapangan.</p> <p>B09 :</p> <p>1. Tersusunnya hasil pengolahan dan analisa data penelitian;</p> <p>2. Tersusunnya draft laporan hasil penelitian;</p> <p>3. Terlaksananya presertasi hasil penelitian;</p> <p>4. Tersusunnya laporan hasil penelitian.</p> <p>B12 :</p> <p>1. Tersedianya buku hasil penelitian;</p> <p>2. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan.</p> <p>Penelitian Anaromi Sengketa Agraria Yang Membedakan Konflik Sosial</p> <p>.. Tersedianya buku hasil penelitian yang menyajikan data dan informasi tentang dampak dari regulasi sektor agraria di tingkat pusat</p> <p>B06 :</p> <p>1. Tersusunnya proposal penelitian;</p> <p>2. Tersusunnya Desain Penelitian;</p> <p>3. Tersusunnya instrumen</p>	<p>Udibhanglam</p>

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERLIASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
18	Penguatan dan Pembinaan hukum nasional	<p>(Studi Tentang Dampak Regulasi Puset dan Daerah di Sektor Agraria Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia)</p>	<p>dan daerah terhadap munculnya pelanggaran hak asasi manusia di tengah masyarakat;</p> <p>2. Tersusunnya rekomendasi kebijakan berupa <i>policy memo</i> dan <i>policy brief</i> yang berkaitan dengan regulasi agraria baik di tingkat pusat maupun daerah yang akan disampaikan kepada <i>stakeholders</i>.</p>	<p>penelitian;</p> <p>4. Tersedianya data hasil disiasi dan konsultasi dengan pemangku kepentingan;</p> <p>5. Terlaksananya presertasi desain penelitian;</p> <p>6. Tersedianya hasil penelitian lapangan.</p> <p>BM1 :</p> <p>1. Tersusunnya hasil pengolahan dan analisa data penelitian.</p> <p>2. Tersusunnya draft laporan hasil penelitian;</p> <p>3. Terlaksananya presertasi hasil penelitian;</p> <p>4. Tersusunnya laporan hasil penelitian;</p> <p>BI2 :</p> <p>1. Tersedianya buku hasil penelitian;</p> <p>2. Tersusunnya Rekomendasi Kebijakan.</p>	DPLN

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		<p>1. Terwujudnya perubaha a Sistem Bantuan Hukum di Kan- tor Wilayah (KANWIL).</p> <p>2. Teningkata n jumlah penerima bantuan hu- kum bagi orang atau kelompok miskin</p>	<p>1. Terwujudnya peraturan a. Permenkumham No. 22 Tahun 2014 b. Juklak pu-nyaluar: darya bea-tuan hukum. c. Juklak peng awasan 2. Terwujudnya SOP Bankum 3. Terwujudnya sistem informasi database (SID) bantuan hukum 4. Jumlah penerima bantuan hukum meningkat.</p>	<p>peraturan perundang- undangan sektor kementerian B12 : Analisis peraturan perundang undangan sektor kementerian</p> <p>BO6 : 1. Disalarkannya per-aluar: pelaksara 2. Terselaksarkannya SOP Bankum 3. Terselaksarkannya aplikasi SID Bankum BO9 : Digunalkannya SID Bankum secara online oleh OBH dan Kawwil Kembanganham untuk memu-dahkan sistem reimbursment dan moritoring B12 : Dereambahnya persentase permokon-er bantuan hukum yang memeruhi persyaratan re-imbursment karena adanya perubahan peraturan pelaksanaat dan penggunaan SID Bankum</p>	BPHN

B. Target Kinerja Kantor Wilayah

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PEYANGGUNG JAWAB
19	Penguatan pola pikir dan budaya kerja dalam kerangka revolusi mental	Adanya komitmen Pimpinan yang kuat dan konsisten dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	Ditundatanganinya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh Menteri Hukum dan HAM, 11 pimpinan unit eselon I dan eselon II, 33 Kepala Kantor Wilayah, dan 773 Kepala UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.	<p>B06 : Ditundatanganinya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh Kepala Kantor Wilayah dan para Kepala Divisi</p> <p>B09 : Ditundatanganinya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh 50% Kepala UPT</p> <p>B12 : Ditundatanganinya pakta integritas "REVOLUSI MENTAL" oleh 100% Kepala UPT</p>	Kakanwil

Tersosialisasikannya dan terdapatnya nilai-nilai Kementerian Hukum dan HAM dalam semangat "Kami PASTI" dengan jejel *Salam

Pembaharuan.....Kami PASTI II" kepada pegawai di jajaran Kantor Wilayah dan UPT

B06 :
1. Sosialisasi "Kami PASTI" melalui media web resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

B09 :
2. Melaksanakan SE terkait memajukan nilai-nilai semangat "Kami PASTI" ke dalam materi arahan pimpinan Kantor Wilayah

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		Agan Perubahan sebagai <i>role model</i> dalam reformasi birokrasi dalam rangka revolusi mental	Terbertuknya agan perubahan melalui <i>coaching and mentoring</i> dengan <i>peer review</i> dan <i>mentoring</i>	dan UPT pada setiap apel upacara, dll D09 : Mengikuti Survey tingkat pemahaman pegawai terhadap nilai nilai "Kami PASTI" beserta ye] vel nya. B12 : Melaksanakan Rekomendasi tindak lanjut atas hasil survey	
	Adanya perubahan perilaku pegawai terhadap kinerja, etika, dan	Meningkatnya 20% tingkat disiplin pegawai dilihat dari indikator absensi dan pembayaran tunjangan	B06 : Terbertuknya Surat Penetapan Agan Perubahan Kantor Wilayah dan sosialisasi ke seluruh jajaran di Kanwil D09 : Melaksanakan <i>coaching and mentoring</i> serta implementasinya dengan modul dari Kantor Pusat D12 : Monitoring dan evaluasi	B06 : 1. Melaksanakan penertiban asersi 2. Sosialisasi gerakan "Ayo Kerja"	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN		UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		kedisiplinan.	kinerja			
		Adanya <i>Quick Wins</i> Kementerian Hukum dan HAM berdampak dan dirasakan langsung masyarakat.		Tersosialisasikan <i>quick win</i> 2015 kepada 44.178 pegawai Kementerian.	B06 : Sosialisasi SK Menkumham tttg <i>Quick Wins</i> Kementerian Hukum dan HAM B09 : Implementasi B12 : Laporan Monitoring dan Evaluasi	
20	Peringkataran Pelayanan Publik	Pelayanan publik cepat, transparan, dan bebas pungli	Menurunnya aduan masyarakat terkait pungli	D06 : 1. Terbertukrnya Tim Pengawas Layanan Publik 2. Rapat Koordinasi internal dan UPT 3. Penerbitan layanan publik D09 : Implementasi B12 : Laporan Monev	Kakanwil	
21	Peringkat: Akuntabilitas	Akuntabilitas pada seluruh aspek pelaksanaan kinerja	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja sampai tingkat UPT	B06 : Sosialisasi aturan terkait penyusunan laporan akuntabilitas kinerja	Kakanwil	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
22	Penguatan Pengawasan	Pengendalian dan pengawasan pada seluruh aspek pelaksanaan kinerja	Adanya satuan tugas SIPP yang hardal dan kompeten sebagai pengendali dan pengawas proses bisnis pada Kanwil dan UPT	B06 : Terbentuknya Tim Penguatan SIPP di Kanwil, yang beranggotakan Kalakanwil, para Kadiv, Kabag PPL, Kabag Umum, Kabag Kepegawajan, dan Kepala UPT. B09 : Rapat koordinasi dan implementasi D12 : Laporan Monev pengawasan	Kakanwil
23	Tindaklanjuti temuan BPK/ DPKP/ Inspektorat Jenderal	Tindaklanjutannya tindaklanjuti temuan BPK/ DPKP/ Inspektorat Jenderal sesuai rekomendasi secara akuntabel	Berkurangnya jumlah temuan BPK/ DPKP/ Inspektorat Jenderal yang harus dilakukan tindak lanjut	D06 : Tindaklanjutannya tindak lanjut temuan BPK/ DPKP/ Inspektorat Jenderal B09 : Tindaklanjutannya tindak lanjut temuan BPK/ DPKP/ Inspektorat Jenderal B12: Evaluasi dan laporan	Kadivmin

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
24	Perubahan dan Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	Tertaksananya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)	1. Merumusnya tingkat penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi kanwil. 2. Merumusnya tingkat penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis.	ID06: 1. Terbenluknya Saugas SPIP 2. Terselenggaranya Sosialisasi SPIP B09 : Adanya penetaan: - Injungan pengendalian 2. Tersusunnya rencana tindak pengendalian (RTP) B12 : 1. Tertaksananya pengendalian internal pemerintah 2. Evaluasi dan Laporan	Kadivmin
25	Transparansi dalam Promosi/ Mutasi Pegawai melalui Baperjaka III	Terwujudnya Promosi/ Mutasi Pegawai yang transparan.	1. Tertaksananya promosi, mutasi, dan rotasi pegawai eselon III dan IV melalui mekanisme Tim Penilai Kinerja 2. Tertaksananya operasi jidling internal untuk peningkatkan pegawai eselon V.	B06: 1. Terbenluknya Sekretaris Tim Penilai Kinerja 2. Tertaksananya forum Tim Penilai Kinerja secara konsisten dan tepat waktu sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku	Kadivmin

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN		TARGET CAPAIAN	PENGANGGUNG JAWAB
26	Optimalisasi Pemanfaatan Aplikasi e office (siMAYYA)	Terimplementasikannya tata persuratan pada Kantor wilayah; memanfaatkan aplikasi siMAYYA	Terselenggaranya pencatatusahaan surat dinas secara cepat dan tepat	B06: Terbentuknya Tim Pengelola siMAYYA R09 : Pemanfaatan siMAYYA dalam penatatusahaan surat dinas R12: Evaluasi pemanfaatan siMAYYA	Kadivimin	
27	Optimalisasi Pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg) Kennerkurngham	Tersediarnya data pegawai yang up-to-date secara on-line	Seluruh satuan kerja meningkatkan SIMPEG secara optimal	D06: Penutakhiran data kepegawaian ke dalam SIMPEG (dossier) D09: Penutakhiran data kepegawaian ke dalam SIMPEG (dossier) B12: 1. Penutakhiran data kepegawaian ke dalam SIMPEG (dossier) 2. Evaluasi	Kadivimin	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENGANGGUNG JAWAB
28	Pelaksanaan: Keptalar: sesuai Disbursement/Plan	Tetlaksanaanya realisasi anggaran: secara akumulabel sesuai target nasional sebesar 95%	Terealisasiannya output kegiatan dan realisasi anggaran sesuai disbursement plan per triwulan: 1. Triwulan I = 18 % 2. Triwulan II = 50 % 3. Triwulan III = 75 % 4. Triwulan IV = 95-100 %	D06: 1. Tersusunnya disbursement plan pada seluruh satuan kerja 2. Tersusunnya laporan: penyerapan anggaran: triwulan II B09: Tersusunnya laporan: penyerapan anggaran triwulan III H12: 1. Tersusunnya laporan penyerapan anggaran akhir tahun triwulan IV 2. Evaluasi	Kadivimin
29	Rapel koordinasi mekaterisime baru seiring dengan Restrukturisasi Program dan Kegiatan	Terwujudnya kesesuaian pemenuhan: terhadap mekaterisime perencanaan: dan pelaksanaan anggaran pasca restrukturisasi program dan kegiatan	Tetlaksanaanya rapel koordinasi dan sinkronisasi dengan seluruh jajaran: Kantor wilayah termasuk UPT	D06 : Rapel koordinasi dan sosialisasi aturan-aluran baru D09 : Implementasi D12 : Monitoring dan Evaluasi	Kadivimin
30	Penertiban BMN	Tengelaan BMN di lngkungan	: Tetlaksanaanya penertiban: BMN pada	B06 : 1. Tetraentuknya satuan	Kadivimin

--

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
31	Optimalisasi Layanan Pemasyarakatan	Meningkatkan kualitas layanan kunjungan, informasi dan perogudua	50% UPT Pemasyarakatan pada setiap wilayah menyelenggarakan Layanan Kunjungan, Pengaduan Dan Informasi berbasis IT	<p>UGAS penertibar: DMN pada Kantor Wilayah</p> <ol style="list-style-type: none"> Identifikasi DMN bermasalah Dokumentasi digital BMN berupa tanah, bangunan dan kendaraan <p>B09 :</p> <ol style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi tindak lanjut BMN bermasalah (dengan pihak terkait lainnya, contoh: HPY, PLJ) Perluasananya sosialisasi kebijakan Kementerian Hukum dan HAM tentang pemeliharaan dan pengamanan BMN <p>B12:</p> <p>Penyampaian laporan tindak lanjut BMN bermasalah</p>	Kadivpas

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya kelancaran data SIDP	50% UPT pas melakukan penginputan data SIDP secara valid	<p>Indikator Layanan: Pemasyarakatan berbasis IT B09 : Penetapan 50% UPT Pas yang menyelenggarakan layanan Pemasyarakatan berbasis IT B12 : Bintorwasdal Melalui Media Online</p>	<p>B06 : 1. Pemetaan LPT Pas yang sudah melakukan penginputan data secara valid 2. Penyempurnaan Peraturan Menteri tentang Sistem Database Pemasyarakatan B09 : 50% LPT Pas yang melakukan penginputan data SIDP secara valid B12 : Bintorwasdal Melalui Media Online</p>	Kadivpas
	Tertaksananya pergusulan Pemberian PJ secara online	Pergusulan PJ secara online di 50% Kantor wilayah	<p>B06 : 1. Mengusulkan peserta Dimrek operator PJ online 2. Mengusulkan PJ secara</p>	Kadivpas	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	Peringkatan kualitas layanan kesehatan WBP	Meningkatkan layanan kesehatan Kapi/Talunan melalui kerjasama dengan instansi dan mitra terkait	B06 : 1. Penyempurnaan Surat edaran untuk melaksanakan kerjasama dengan instansi dan mitra terkait 2. Melaporkan peningkatan kualitas kesehatan kepada Napi/Talunan D09 : Melaporkan peningkatan kualitas keselamatan kepada Napi/Talunan D12 : Bimotorsdal Melalui Media Online	online D09 : Mengusulkan PB secara online B12 : Bimotorsdal melalui media online	Kadiyapas
	Meningkatnya layanan pembinaan WBP	Peringkatan pembinaan kepribadiar dan nmnu pelatihan kemandirian	B06 : - Tercapainya 50% WBP yang aktif dalam pembinaan kepribadiar		

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban	Meningkatnya pembinaan, pengawasan, pengendalian keamanan dan ketertiban	<p>B06 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengaturan Satgas Kamtibmas 2. Penggelandaran nuntun dan sidak ganjungan 3. Tindak lanjut temuan satgas 4. Tidak terjadi gangguan kamtibmas sebesar 10% <p>B09 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penguatan 	<p>B06 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pengaturan Satgas Kamtibmas 2. Penggelandaran nuntun dan sidak ganjungan 3. Tindak lanjut temuan satgas 4. Tidak terjadi gangguan kamtibmas sebesar 10% <p>B09 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya penguatan 	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		<p>Memingkatkan pergelanaan berda sitaan dan barang rampasar negara</p>	<p>Peningkatan pemeliharaan dan pengelolaan Basan dan Baran secara baik</p>	<p>B06 : Tercapainya 50 % basar dan baran yang dipelihara dan dikelola dengan baik D09 : Tercapainya 75 % basar dan baran yang dipelihara dan dikelola dengan baik D12 : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan basan dan baran di Rupbasan</p>	
	<p>Memingkatkan pembinaan kemasyarakatan</p>		<p>Peningkatan bimbingan Kemasyarakatan dan pengertasar arak</p>	<p>B06 : Tercapainya 50 % layanan Pembimbingan Klien Kemasyarakatan</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	dan diperluas: anak	Meningkatkan pelayanan pada Poliklinik Lepas Rutan dan Rumah Sakit Pengayoman	Terbitnya surat izin atau legalitas praktek tenaga medis dan paramedis di poliklinik Lepas Rutan dan Rumah Sakit Pengayoman	<p>B09 : Tercapainya 75 % layanan Pembimbingan Klieni Kemasyarakatan</p> <p>B12 : Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan Pembimbingan Klieni Kemasyarakatan</p>	
				<p>B06 : Tercapainya 50 % tenaga medis dan paramedis di poliklinik Lepas Rutan dan Rumah Sakit Pengayoman yang memiliki legalitas (SIT/STR/SIPA)</p> <p>B09 : Tercapainya 75 % tenaga medis dan paramedis di poliklinik Lepas Rutan dan Rumah Sakit Pengayoman yang memiliki legalitas (SIP/STR/SIPA)</p> <p>B12 : Monitoring dan evaluasi data tenaga medis dan paramedis di poliklinik Lepas Rutan dan Rumah Sakit Pengayoman yang memiliki legalitas</p>	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
		KERFIRHASILAN		(SIP/STR/SIPA)	
32	Implementasi Undang-Undang No. : Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Terlaksananya dukungan terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sesuai ketentuan yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> 1. a. Terselenggaranya bimtek PK Anak secara online b. Tersedianya PK Anak dan Pembantu PK Anak pada setiap Pos Bapas 2. Terselenggaranya minimal : (satu) Pos Bapas pada setiap kantor 	D06 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusulan peserta Bimtek PK Anak minimal sebanyak 20 orang 2. Mensosialisasikan mekarisme dan uraian tugas Pos BAPAS melalui media online 3. Mengusulkan PK Anak dan menetapkan Pembantu PK Anak. B09 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Pos BAPAS 2. Penetaan wilayah kerja BAPAS dan mengusulkan wilayah kerja Pos BAPAS. B12 : Hintorwasdal Melalui Media Online	Kadivpas
33	Peringkatkan Pembinaan Peggawasan Dan Perpendalian Dalam Rangka Gelang To Zero Harophone Pungih Dar: Markoba (HALINARI)	Optimalisasi Pelaksanaan Saluran Tugas Keammanan dan Kelentihan (Salgas Kamiti)	Pembinaan Personil Salgas Kamiti 1 kali dalam setahun	D06 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun rencana kerja Salgas Kamiti tingkat Wilayah: dan UPT 2. Penguatan Salgas Kamiti kantor Wilayah dan UPT melalui briefing 3. Penggeledahan rutir. 	Kadivpas

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
34	Kegiatan Kerja Produktif	Optimalisasi kegiatan kerja produktif melalui kerjasama dengan pihak ke 3	Tertindakannya 25% UPT yang melaksanakan kerjasama dengan pihak ke 3	<p>dan tidak</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pembentukan Megehis Kode Etik Wilayah 5. Sidak Satgas Kamtib 6. Tindak lanjut terhadap temuan Satgas Kamtib <p>B09 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sidak Satgas Kamtib 2. Tindak lanjut terhadap temuan Satgas Kamtib <p>B12 :</p> <p>Hintorwasdal Melalui Media Online</p> <p>R06 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampain Blus-Print Kegiatan Kerja Narapidana ke UPT Pemasyarakatan 2. Pengiriman Surat Edaran untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ke 3 3. Pelaksanaan kegiatan kerja dengan pihak ke 3 di UPT Pemasyarakatan <p>B09 :</p> <p>Pelaksanaan kegiatan kerja dengan pihak ke 3 di UPT Pemasyarakatan</p>	Kadivpas

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENGANGGUNG, JAWAB
35	Optimalisasi Pengelolaan Basan Dan Baran	Menguatnya peran Rupbasan dalam tugas fungsi Pengelolaan Basan dan Baran	Terselenggaranya pengelolaan basan dan baran melalui koordinasi kepala korpasian dengan Kepala Instansi, kejaksaan dan pengadilan serta KTK dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama (SKB)	D12 : Dimonitoring Melalui Media Online B06 : Menginventarisasi permasalahan dalam pengelolaan basan baran B09 : Melakukan koordinasi terhadap permasalahan pengelolaan basan baran B12 : Rintorwasdal Melalui Media Online	Kadivpas
	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan aset oleh Rumah: Penyimpanan berda sitaar dan barang rarpasaan negara (Rupbasan)	Terpubikasi secara reguler dalam website Rupjasan atau pelaksanaan fungsi pengelolaan aset yang antara lain memuat informasi data barang silau yang dikelola (termasuk jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, kondisinya, dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang	B06 : Tersedianya data inventarisasi basan dan baran masing-masing UPT Rupbasan yang memuat jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, kondisinya, dan tindakan yang diambil dalam rangka menyelamatkan barang silau B09 : Tersedianya data inventarisasi basan dan baran masing masing UPT		

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
36	Peningkatan kualitas pelayanan perorangan paspor di Kantor Imigrasi.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan paspor pada Kantor	<p>1. Terselenggaranya paspor lepat waktu;</p> <p>2. Terciptanya kenyamanan dalam pelayanan perorangan paspor;</p> <p>3. Terlaksananya pelayanan <i>One Stop Service</i>.</p>	<p>Rupbagan yang memenuhi jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, kondisinya, dan uraian yang diambil dalam rangka menyelenggarakan barang sitaan</p> <p>B12 :</p> <p>Tersedianya data inventarisasi basan dan baran masing masing UPT</p> <p>Rupbagan yang memuat jumlah, jenis, estimasi nilai, waktu mulai dikelola, kondisinya, dan tir-dakan yang diambil dalam rangka menyelenggarakan barang sitaan</p> <p>DD6:</p> <p>1. Penubnlukar: Tim pelaksanaan sosialisasi SOP <i>One Stop Service</i>;</p> <p>2. Penger-dahan pelaksanaan penyelesaian paspor 3 (tiga) hari kerja setelah foto (92%).</p> <p>B09:</p> <p>1. Penger-dahan pelaksanaan: <i>One Stop Service</i>;</p>	Kadivim

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENGANGGUNG JAWAB
37	Pengendalian pelaksanaan pengawasan dan perindakaan perindakaan keimigrasian.	Terlaksananya pengawasan dan perindakaan keimigrasian.	1. Meningkatkan intensitas koordinasi pengawasan dan perindakaan keimigrasian 2. Terlaksananya per egatkan hulum terindap pelanngaran keimigrasian	B06: 1. Terlaksananya pengawasan keimigrasian pada 30% wilayah kerja. 2. Terlaksananya perindakaan keimigrasian atau pelanngaran keimigrasian yang terjadi melalui mekanisme Tiridakan Admistratr Keimigrasian dan Pro Justha (50%). B09: 1. Terlaksananya pengawasan keimigrasian pada 60% wilayah kerja	Kadivim

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN		TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
38	Optimalisasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan Imigrasi Legal, Pencari Suaka dan Pergungsi.	Terwujudnya koordinasi dengan Instansi terkait dalam penanganan imigrasi legal, pencari suaka dan pergungsi.	Imigran legal, Pencari Suaka dan Pergungsi terintegrasi dengan baik dan tepat.	Indic:	<p>2. Terlaksananya penindakan keimigrasian alias pelanggaran keimigrasian yang terjadi melalui mekanisme Tir-dakan Administrasi Keimigrasian dan Pro Justitia (60%)</p> <p>B12:</p> <p>1. Terlaksananya pengawasan keimigrasian pada 75% wilayah kerja</p> <p>2. Terlaksananya penindakan keimigrasian atas pelanggaran keimigrasian yang terjadi melalui mekanisme Tir-dakan Administrasi Keimigrasian dan Pro Justitia (75%)</p>	Kadivim
				Indic:	<p>1. Terbenlulknya Tim Salgas Penanggulangan dan Penyelenggaraan Imigrasi legal, Pencari Suaka dan Pergungsi.</p> <p>2. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan dan</p>	

22

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
			Setiap keluhan dan pengaduan masyarakat	B06: 1. Terbitnya Surat Keputusan:	
39	Pengelolaan Keluhan dan Pengaduan	Terselesaikannya keluhan dan		<p>penanganan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi;</p> <p>3. Evaluasi dan laporan terkait kesiapan Tim Satgas Penanggulangan dan Penanganan Imigran ilegal, Pencari Suaka dan Pengungsi.</p> <p>B09: Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam rangka penanganan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi.</p> <p>H12: 1. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait dalam rangka penanganan dan penanganan imigran ilegal, pencari suaka dan pengungsi;</p> <p>2. Monitoring, evaluasi dan laporan.</p>	Kadivim

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENVANGGUNG JAWAB
40	<p>Masyarakat</p> <p>Optimalisasi pengendalian pemeriksaan keimigrasian di TPI (Tempat Pemeriksaan)</p>	<p>pergaduar: masyarakat dengan baik.</p>	<p>dislesaikan, ditanggapi dan diberikan penjelasan oleh Tim pengelola keimigrasian dan pergaduar masyarakat.</p>	<p>Tentang Pembentukan Tim Pengelola Keluar dan Pergaduan Masyarakat;</p> <p>2. Tersedianya sarana penyediaan keluaran dan pergaduan masyarakat melalui kotak surat, sms, dan jejaring sosial lainnya.</p> <p>3. Pelaksanaan kegiatan penerimaan pengaduan masyarakat penyelesaian dan penyelesaian masyarakat</p> <p>H09:</p> <p>Pelaksanaan penerimaan penyelesaian pengaduan masyarakat.</p> <p>B12:</p> <p>1. Pelaksanaan penerimaan penyelesaian pengaduan masyarakat.</p> <p>2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.</p> <p>B06:</p> <p>1. Terbitnya Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Optimalisasi pengendalian pemeriksaan keimigrasian di TPI.</p>	Kadivim

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
41	Penguatan database Keayaan Intelektual Komunal (KIK) Migrasi;	Tersusunnya database Keayaan Intelektual Komunal (KIK)	Tersertainya database KIK antara lain Indikasi Geografis, Pergerakan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Keamkaranjamaan Hayati, Ekspresi Budaya Tradisional, dan/atau Kearifan Lokal.	<p>2. Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pergerakan pemertiksaan keimigrasian di TPI.</p> <p>B09: Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pengendalian pemertiksaan keimigrasian di TPI.</p> <p>B12: 1. Terlaksananya kegiatan pengawasan terhadap pengendalian pemertiksaan keimigrasian di TPI; 2. Monitoring, evaluasi dan laporan.</p> <p>E06: 1. Terjenuhnya Tim Inventarisasi KIK 2. Terkirimnya Surat Perintah Data KIK 3. Pembuatan database KIK B-09: Pembuatan database KIK B12: Evaluasi dan Laporan KIK</p>	Kediv Yankeum

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
42	Optimalisasi Fungsi Karwil Sebagai Pusat Layanan Hukum di Daerah	Meningkatkan fungsi karwil dalam memberikan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum	inventarisasi Prolegda, Perda, dan Daftar Buku Terpustakaan	B06: Pembentukan Tim Perkuat Fungsi Karwil Sebagai Pusat Layanan Informasi dan Dokumentasi Hukum di Daerah D09: Tersedianya Database Prolegda, Perda, dan Daftar Buku Terpustakaan B12: Evaluasi dan Laporan	Kadiv Yankum
43	Pengelolaan Data Notaris wilayah berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat memperoleh informasi mengenai jumlah dan identitas Notaris wilayah secara jelas dan dapat diakses secara online.	Tersedianya informasi mengenai jumlah dan identitas Notaris wilayah yang terbaru (per up date)	D06: Terkirimnya surat permintaan data identitas notaris ke organisasi notaris D09: Tersedianya dan terinventarisasinya data identitas Notaris B12: Evaluasi dan pelaporan.	Kadiv Yankum
44	Digitalisasi database sertifikat fidusia yang telah didaftarkan secara manual	Tersedianya database sertifikat fidusia berbasis teknologi	Tersedianya digitalisasi database sertifikat fidusia yang telah didaftarkan secara manual.	B06: Terlaksananya inventarisasi database sertifikat fidusia	Kadiv Yankum

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN		UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENGANGGUNG JAWAB
			inforansi.			
45	Facilitasi Pemberitahuan Produk Hukum Daerah	Tertindakannya fasilitasi pembentukan Produk Hukum Daerah	Meningkatnya jumlah Prolegda dan Terda yang diberikan pendampingan secara penuh sampai dengan diterbitkannya produk hukum daerah	B06: Terselenggaranya Koordinasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota. D09: 1. Terselenggaranya Kerja sama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi, Kabupaten/ Kota. 2. Tersedianya Rancangan Produk Hukum Daerah. B12: Evaluasi dan Laporan	Kadiv Yankum	
46	Optimalisasi Pelaksanaan RANHAM dan Kab/Kota Peduli	Terwujudnya pelaksanaan RANHAM dan	Tertindakannya koordinasi pelaksanaan RANHAM dan Kab/Kota Peduli HAM	D06: Koordinasi Pelaksanaan RANHAM dan Kab/Kota	Kadiv Yankum	

NO	TARGET KINERJA	KRITERIA KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	TARGET CAPAIAN	PENANGGUNG JAWAB
	LIAM	Kab/ Kota Peduli LIAM		Peduli HAM; B09 : Terlaksananya RANHAM dan Kab/ Kota Peduli HAM B012: Evaluasi dan Laporan Tahunan RANHAM	

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC OF INDONESIA,

